

BAB IV

ANALISIS PENNERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MENJAGA LIKUIDITAS KJKS BINAMA SEMARANG

A. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan KJKS BINAMA Semarang

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Tur Priyono pada tanggal 10 november 2014 manajemen risiko pembiayaan pada dasarnya terletak pada operasional prosedur pembiayaan yang meliputi pemasaran pembiayaan, permohonan pemberian pembiayaan, pengawasan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah.

1. Analisis Pemasaran Pembiayaan KJKS BINAMA Semarang

KJKS BINAMA dalam hal pemasaran memutuskan pemasaran untuk memperkenalkan produk dan jasa KJKS yang ditawarkan, menentukan anggota dan calon anggota yang akan dibidik, menentukan tingkat margin dan bagi hasil sebagai agen, memberikan keputusan dan kepuasan kepada masyarakat luas.

Pemasaran yang dilakukan oleh KJKS BIANAMA menurut peneliti dapat dikatakan cukup baik dari data yang peneliti paparkan sebelumnya pemasaran produk di KJKS BINAMA menggunakan pendekatan-pendekatan yang teratur dan baik yaitu dengan menciptakan manfaat pemilihan skim pembiayaan usaha dengan melakukan inovasi berbagai jenis produk dengan kemudahan fasilitas dan margin, bagi hasil yang kompetitif, manfaat tren usaha yang ada pada masyarakat, manfaat waktu, manfaat tempat, manfaat informasi seperti brosur, media-media *on line*. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan produk unggulan dan produk-produk KJKS yang di

desain menarik sehingga masyarakat tertarik contohnya seperti SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar), SISUKA (simpanan Sukarela Berjangka), pembiayaan KPR, dll. Selanjutnya yaitu pendekatan lembaga karena pendekatan melalui lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran akan menciptakan mekanisme pasar yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga.

2. Analisis Prosedur Pembiayaan pada KJKS BINAMA Semarang

Dari data yang diperoleh peneliti mengenai prosedur pembiayaan pada KJKS BINAMA Semarang bahwa anggota/calon anggota yang hendak melakukan pembiayaan harus melewati prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh KJKS BINAMA Semarang yaitu dari prosedur wawancara sampai dengan prosedur kunjungan usaha anggota/calon anggota oleh pihak KJKS BINAMA Semarang. Setelah prosedur tersebut dilewati, pihak KJKS BINAMA menganalisis formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi oleh anggota/calon anggota. Dalam menganalisis formulir permohonan yang telah diisi oleh anggota/calon anggota, pihak KJKS BINAMA mengacu pada prinsip 5C dalam memutuskan apakah permohonan pembiayaan anggota/calon anggota disetujui atau tidak.

Namun pada tahun 2013, KJKS BINAMA kurang dapat mengelola prosedur pembiayaan, karena pemberian pembiayaan terlalu tinggi dibandingkan dengan dana pihak ketiga (DPK).

Dari uraian diatas peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dari data-data yang telah peneliti dapat dari KJKS BINAMA Semarang tentang prosedur pengajuan pembiayaan dan peneliti bandingkan dengan teori yang ada, prosedur

pengajuan pembiayaan yang diterapkan KJKS BINAMA Semarang sudah bisa dikatakan cukup baik, karena prosedur yang ditetapkan sudah tersusun secara sistematis dari tahap wawancara sampai dengan tahap kunjungan usaha, dan dalam memutuskan persetujuan pembiayaan pihak KJKS BINAMA Semarang berpedoman pada prinsip 5C dan menerapkan kesyariahan sebagai Koperasi Syariah.

3. Analisis Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan pada KJKS BINAMA

Dalam melakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan KJKS BINAMA Semarang dengan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan administratif. Selain kedua pengawasan tersebut, sebetulnya KJKS BINAMA mempunyai strategi pengawasan dan monitoring yang baik yaitu memberi konsultasi usaha dan manajemen kepada semua anggota, kegiatan tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah usaha yang dihadapi anggota dan sebagai ajang untuk lebih menambah kedekatan antara pihak manajemen KJKS BINAMA dengan anggotanya. Selain itu tujuan dari konsultasi manajemen adalah untuk mengawasi dan memonitoring pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota/calon anggota.

Dari pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BINAMA Semarang menurut penulis sudah bisa dikatakan cukup baik, karena pengawasan dan monitoring yang dilakukan berjalan secara berkesinambungan dari data administratifnya sampai dengan kegiatan usaha anggota di lapangan, hal tersebut akan selalu memberi informasi kepada KJKS BINAMA tentang perkembangan pembiayaan yang telah disalurkan kepada para anggota/calon anggotanya. .

4. Analisis Penyelesaian dan Penangan Pembiayaan bermasalah

Dari data mengenai pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BINAMA Semarang kepada anggota/calon anggota dan jumlah pembiayaan bermasalah tersebut, maka langkah dalam melakukan analisis terhadap data yang ada adalah dengan menghitung prosentase jumlah pembiayaan bermasalah terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Tabel 12

Perbandingan Jumlah Pembiayaan Terhadap Jumlah Pembiayaan Bermasalah.

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	NPF %
2012	35,475,809,330.71	1,674,464,205.00	4,75%
2013	53,245,745,329.58	1,969,867,953.69	4,02%

Sumber: Bagian administrasi KJKS BINAMA dan diolah oleh peneliti.

Dalam koperasi syariah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi dengan melihat NPF yang terjadi, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin tidak sehat, ketentuan NPF pada KJKS adalah 5%.

Dari tabel 12 dapat dilihat pembiayaan bermasalah pada KJKS BINAMA Semarang dari tahun 2012 samapi tahun 2013 mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2012 sebesar Rp.1,674,464,205.00 naik menjadi Rp.1,969,867,953.69 di tahun 2013. Hal tersebut perlu mendapat perhatian mengapa timbul pembiayaan bermasalah. Untuk itu, peran pengawasan pembiayaan sangat diperlukan untuk membuat

pembiayaan yang ada dapat ditekan serendah mungkin sehingga semakin banyak pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas lancar.

Dapat dilihat dari tahun 2012 pembiayaan yang diberikan meningkat sebesar Rp. 35,275,809,330.71 dan peningkatan pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 1,674,464,205.00 atau sebesar 4,75%. Pada tahun 2013 jumlah pembiayaan yang diberikan naik kembali sebesar Rp.49,014,432,8s37.72 dan diikuti dengan kenaikan pembiayaan bermasalah sebesar Rp.1,969,867,953.69 atau naik 4,02%.

Dari analisis diatas KJKS BINAMA setiap tahun mengalami peningkatan pemberian pembiayaan yang selalu diikuti dengan jumlah pembiayaan bermasalah yang selalu menurun. Hal tersebut berarti tingkat pengelolaan pembiayaan bermasalah pada KJKS BINAMA cukup baik.

B. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas KJKS BINAMA Semarang.

Dari keterangan diatas, hal ini dapat dilihat dari penerapan manajemen risiko pembiayaan di KJKS BINAMA tahun 2012 meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pembiayaan, pengawasan (*monitoring*) dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di KJKS BINAMA dapat dikatakan cukup baik.

Dilihat dari Penilaian likuiditas pada KJKS BINAMA Semarang tahun 2012, dari *Cas Ratio*, *Reserve Requirement*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Financing to Asset Ratio* menunjukkan bahwa likuiditas pada KJKS BINAMA Semarang tergolong dalam kategori sehat.

Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di KJKS BINAMA yang cukup baik dapat mempengaruhi likuiditas KJKS BINAMA sehingga dapat berintermediasi kepada anggota dengan baik.

Untuk penerapan manajemen risiko pembiayaan di KJKS BINAMA tahun 2013 meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pembiayaan, pengawasan (*monitoring*) dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di KJKS BINAMA juga dapat dikatakan cukup baik namun pada tahun 2013, KJKS BINAMA kurang dapat mengelola prosedur pembiayaan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 yaitu pemberian pembiayaan lebih tinggi dibandingkan dengan dana dari deposit. *Financing to Deposit Ratio* sebesar 111,87% artinya apabila FDR diatas 110% maka kemampuan KJKS dalam melakukan intermediasi dengan mengandalkan dana dari deposit kurang sehat, dengan kata lain KJKS kurang mampu melakukan intermediasi dengan mengandalkan dana pihak ketiga apabila FDRnya diatas 110%. Namun likuiditas pada KJKS BINAMA Semarang pada tahun 2013 menurut penilaian *Cas Ratio*, *Reserve Requirement*, dan *Financing to Asset Ratio* menunjukkan bahwa likuiditas pada KJKS BINAMA Semarang dapat dikatakan sehat atau KJKS dapat melakukan pembayaran kewajiban jangka pendeknya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di KJKS BINAMA yang kurang baik dapat mempengaruhi likuiditas yang kurang baik juga, hal ini menunjukkan ada pengaruh antara implementasi manajemen risiko pembiayaan untuk menjaga likuiditas KJKS BINAMA Semarang.